



3.1.7.8 KECAMATAN LUBUK KILANGAN

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020, dari APBD Kota Padang Tahun 2020 untuk Kecamatan Lubuk Kilangan didukung anggaran sebesar Rp11.043.610.991,73 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.292.716.972,- atau 93,20 % dengan uraian sebagai berikut:

I. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM Kecamatan	83 %	86,79 %	104,57
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip Kecamatan	BB	BB	100
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran				
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Program Pengembangan Kecamatan	Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat	20 %	30 %	150

II. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No	Uraian Program/Kegiatan	Kebijakan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(A)	Belanja Tidak Langsung		100	100	100	5,775,470,870	5,087,589,751	88.09
I	Gaji dan Tunjangan		54 orang	48 orang	89	3,787,808,870	3,403,254,123	89.85
II	Tambahan Penghasilan PNS		54 orang	48 orang	89	1,987,662,000	1,684,335,628	84.74
(B)	Belanja Langsung		100	100	100	5,268,140,122	5,205,127,221	98.80
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100	731,289,675	711,273,516	97.26
1	Penyediaan jasa surat menyurat		1500 Lembar	1130 Lembar	75	6,000,000	3,690,000	61.50



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Tahun 2020

	2	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		17rekening	17rekening	100	80,400,000	71,114,466	88.45
	3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas		25unit	25unit	100	5,110,000	4,751,700	92.99
	4	Penyediaan Jasa kebersihan kantor		2orang	2orang	100	39,600,000	39,600,000	100.00
	5	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja		33unit	33unit	100	11,000,000	10,320,000	93.82
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		32item	32item	100	58,447,675	58,422,900	99.96
	7	Penyediaan Barang Cetak		5 ; 128655Macam, lembar	5 ; 128655Macam, lembar	100	55,000,000	52,831,500	96.06
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor		11macam	11macam	100	16,500,000	16,307,000	98.83
	9	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor		44unit	44unit	100	153,112,500	151,085,000	98.68
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan		184eksemplar	184eksemplar	100	17,160,000	14,910,000	86.89
	11	Penyediaan Makanan dan Minuman		2432kotak	2432kotak	100	66,400,000	66,313,500	99.87
	12	Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah		9kali	9kali	100	88,476,500	88,141,500	99.62
	13	Penyediaan Alat Kebersihan		12unit	12unit	100	12,000,000	11,984,950	99.87
	14	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		7orang	7orang	100	102,283,000	102,001,000	99.72
	15	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		1orang	1 orang	100	19,800,000	19,800,000	100.00
II	Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur			100%	100%	100	135,000,000	134,652,505	99.7426
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional		25unit	25unit	100	115,000,000	114,843,005	99.86
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor		4unit	4unit	100	20,000,000	19,809,500	99.05
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		Meningkatkan kualitas Penyusunan Dokumen pelaporan keuangan dan realisasi ikhtisar SKPD	100 %	100 %	100	37,000,000	35,968,000	97.21
	1	PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8dokumen	8dokumen	100	37,000,000	35,968,000	97.21
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran		Menigkatkan kapasitas Pengendalian Internal Kinerja Aparat pemerintahan	100 %	100 %	100	50,000,000	46,929,400	93.86
	1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		6dokumen	6dokumen	100	25,000,000	24,819,400	99.28
	2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		8Area perubahan	8Area perubahan	100	25,000,000	22,110,000	88.44
V	Program Pengembangan Kecamatan		MeningkatkanPartisipasi Masyarakat	100 %	100%	100	4,314,850,447	4,276,303,800	99.11
	1	Pengembangan Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan pelayanan administrasi umum lainnya	83orang	83orang	100	41,620,750	39,433,000	94.74



2	Penerapan PATEN DI Kota Padang	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan	5pelayanan	5pelayanan	100	98,844,250	94,102,500	95.20
3	Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan kelurahan	Meningkatkan kelengkapan data kelurahan	24kali	24kali	100	32,995,000	32,243,400	97.72
4	Pembangunan sarana dan prasaranakelurahan	Peningkatan perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan dan drainase tersier	15lokasi	15lokasi	100	1,255,015,197	1,238,455,000	98.68
5	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Meningkatkan pelayanan sosial dasar yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat	20kegiatan	20kegiatan	100	2,479,109,500	2,466,988,300	99.51
6	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan		15cabang	15cabang	100	220,907,750	219,492,000	99.36
7	Koordinasi Lintas Kelembagaan		24kali	24kali	100	37,920,000	37,861,500	99.85
8	Pengendalian dan pengawasan bangunan liar dan bangunan lainnya di wilayah kecamatan	Peningkatan Pengendalian dalam penataan perizinan IMB	12kali	12kali	100	44,795,000	44,752,600	99.91
9	Fasilitas Penanganan Kebencanaan Kebencanaan Tingkat Kelurahan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	2kegiatan	2kegiatan	100	53,300,000	53,014,900	99.47
10	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan hasil musrenbang sesuai ketentuan	1kegiatan	1kegiatan	100	50,343,000	49,960,600	99.24

III. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Realisasi Kinerja/Keuangan dibawah 80 % karena Efisiensi Anggaran	Penganggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan

IV. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

A. Sasaran: Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan, dengan indikator kinerja yaitu :

1) IKM Kecamatan

(Target Kinerja: 83) (Realisasi Kinerja : 86,79)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan :



- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:
- i) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya yang tersedia sebanyak 1.500 lembar.
 - ii) Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah rekening Listrik, air, telepon kantor camat dan kantor lurah yang dibayarkan sebanyak 17 rekening.
 - iii) Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi sebanyak 25 unit.
 - iv) Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan sebanyak 2 orang.
 - v) Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki sebanyak 33 unit.
 - vi) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah alat tulis kantor yang tersedia sebanyak 32 unit.
 - vii) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan untuk keperluan kantor camat dan kantor lurah yang tersedia sebanyak 5 macam dan 128.655 lembar.
 - viii) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah komponen listrik yang tersedia sebanyak 11 macam.
 - ix) Kegiatan Penyediaan peralatan perlengkapan kantor, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia sebanyak 44 unit.
 - x) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia sebanyak 184 eksemplar.
 - xi) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia sebanyak 2.432 kotak.
 - xii) Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah yang diikuti sebanyak 9 kali.



- xiii) Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Alat Kebersihan yang tersedia sebanyak 12 unit.
 - xiv) Kegiatan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah tenaga honorer yang tersedia sebanyak 7 orang.
 - xv) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Petugas Pengamanan Kantor yang tersedia sebanyak 1 orang
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
- i) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas yang dapat dipelihara dan tersedia BBM Kendaraan roda 4 dan 2 sebanyak 25 unit.
 - ii) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah AC yang dipelihara sebanyak 4 unit.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian Indikator IKM Kecamatan.

2) Nilai SAKIP Kecamatan

(Target Kinerja: BB) (Realisasi Kinerja :BB)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah laporan yang disusun sebanyak 8 dokumen.
- b) Program Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan dan Penganggaran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 6 dokumen.
 - ii) Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi sebanyak 8 Area perubahan.



Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Indikator Nilai Sakip Kecamatan.

B. Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan, dengan indikator kinerja:

**1) Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat
(Target Kinerja: 20) (Realisasi Kinerja : 30)**

Pencapaian target kinerja dari indikator, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengembangan Kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i) Kegiatan Pengembangan Administrasi Pemerintahan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah aparatur kecamatan dan kelurahan mendapatkan kemampuan teknis dan administrasi SDM sebanyak 83 orang.
 - ii) Kegiatan Penerapan PATEN DI Kota Padang, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Administrasi Teadu kecamatan (PATEN) sebanyak 5 pelayanan.
 - iii) Kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan kelurahan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah monitoring dan evaluasi pembinaan kelurahan yang dilakukan sebanyak 24 kali.
 - iv) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat di wilayah kecamatan sebanyak 15 lokasi.
 - v) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat di wilayah kecamatan sebanyak 20 kegiatan.
 - vi) Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah cabang MTQ yang diikuti sebanyak 15 cabang.
 - vii) Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan sebanyak 24 kali.
 - viii) Kegiatan Pengendalian dan pengawasan bangunan liar dan bangunan lainnya di wilayah kecamatan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pengawasan Bangunan liar dan bangunan lainnya sebanyak 12 kali.
 - ix) Kegiatan Fasilitas Penanganan Kebencanaan Kebencanaan Tingkat Kelurahan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan



kebencanaan dan kegiatan tanggap darurat yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan.

- x) Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan rakorbang kelurahan dan musrenbang kecamatan yang dilakukan tepat waktu sebanyak 1 kegiatan.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian Indikator Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat.

V. Capaian Realisasi Kegiatan Penanggulangan Covid-19 Yang Bersumber Dari BTT 2020 Pada Kecamatan Lubuk Kilangan

Dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kecamatan Lubuk Kilangan didukung oleh anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2.562.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp646.092.000,- atau 25 %, dengan uraian sebagai berikut:

No	BTT	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	BTT Tahap 1	823.670.000,-	151.755.810,-	18,42 %
2	BTT Tahap 2	509.522.000,-	494.336.190,-	97,02 %
3	BTT Tahap 3	1.228.808.000,-	0	0 %
Total		2.562.000.000,-	646.092.000,-	25 %

VI. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Pada Penyelenggaraan BTT

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
1	BTT Tahap 1	Juknis belum keluar sedangkan waktu pencairan juga sedikit untuk setoran pengembalian STS	Karena waktu yang sedikit maka realisasi sesuai situasi Covid pada saat bulan itu saja
2	BTT Tahap 2	Realisasi bisa 96 % karena waktu yang cukup dan RKB yg di mintakan hanya untuk satu Bulan	-
3	BTT Tahap 3	Waktu Pencairan yang terlambat sedangkan pengembalian STS harus di segerakan	Tidak di cairkan karena situasi akhir Tahun yang tidak memungkinkan

Lampiran

3.2. Kebijakan Strategis

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

No	Kebijakan Strategis	SKPD Pelaksana	Dasar Hukum (Kebijakan Strategis)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pengangguran, Kemsikinan, Tenaga Kerja dan Keamanan (dalam masa pandemi Covid-19)	a. Pengentasan Kemiskinan akibat Covid-19	Bappeda, Dinas Sosial	1. 2. 3.
		b. Pola Hidup Baru/Protokol Kesehatan	BPBD, BKPSDM Dinas Kesehatan, Satpol PP	1. 2. 3.
		c. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kerawanan Sosial)	Satpol PP	1. 2. 3.
2	Pendidikan dan Kesehatan (dalam masa pandemi Covid-19)	a. Pendidikan/Kegiatan Belajar Mengajar (dalam masa pandemi Covid-19)	Dinas Pendidikan	1. 2. 3.
		b. Kesehatan (dalam penanganan Covid-19)	Dinas Kesehatan	1. 2. 3.
3	Perdagangan, Jasa dan Pariwisata (dalam masa pandemi Covid-19)	a. Perdagangan (dalam masa pandemi Covid-19)	Dinas Perdagangan	1. 2. 3.
		b. Sektor Kepariwisata dan jasa (dalam masa pandemi Covid-19)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. 2. 3.
4	Koperasi, Industri dan Perikanan (dalam masa pandemi Covid-19)	a. Bantuan Modal pada Koperasi dan UMKM (dalam masa pandemi Covid-19)	Dinas Koperasi dan UKM	1. 2. 3.
		b. Bantuan Modal pada Industri (dalam masa pandemi Covid-19)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1. 2. 3.
		c. Bantuan Modal pada bidang perikanan (dalam masa pandemi Covid-19)	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. 2.

No	Kebijakan Strategis		SKPD Pelaksana	Dasar Hukum (Kebijakan Strategis)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
5	Infrastruktur dan Prasarana Daerah	a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR	1. 2. 3.
			- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Drainase	Dinas PUPR	1. 2. 3.
		b. Perumahan Permukiman	- Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dinas PRKPP	1. 2. 3.
			- Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Dinas PRKPP	1. 2. 3.
			- Sanitasi	Dinas PRKPP	1. 2. 3.
			- Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas PRKPP	1. 2. 3.
			- Drainase Lingkungan	Dinas PRKPP	1. 2. 3.
			- Penyediaan Utilitas	Dinas PRKPP	1. 2. 3.
			- Pengentasan Timbunan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	1. 2. 3.
			- Pemakaman Khusus Pasien Covid-19; dan - Pembangunan Pemakaman Umum Baru.	Dinas Lingkungan Hidup	1. 2. 3.
		c. Perhubungan	- Penyediaan Transportasi Masal (dalam masa pandemi Covid-19)	Dinas Perhubungan	1. 2. 3.

No	Kebijakan Strategis		SKPD Pelaksana	Dasar Hukum (Kebijakan Strategis)	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
		d. Prasarana Daerah	- Peningkatan Fungsi RSUD Dr. Rasydin (menjadi RSUD Khusus pasien Covid-19)	RSUD dr. Rasydin	1. 2. 3.
6	Reformasi Birokrasi	a. Optimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat (Kecamatan dan Kelurahan)		Bag. Tapem dan Kecamatan	1. Perwako No 71 Tahun 2019 Tentang Pedoman Administrasi kelurahan 2. Perwako No 84 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perwako 71 tahun 2019
		b. Pemanfaatan aplikasi berbasis online dalam Pelayanan Kepada Masyarakat		Dinas Kominfo, Bag. Tapem dan Kecamatan	1. 2. 3.
		c. Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pelayanan kepada masyarakat		Dinas Kominfo dan Kecamatan	1. 2. 3.

PADANG, 08 Januari 2020
Pit CAMAT LUBUK KILANGAN

Dra. RACHMADENY DEWI PUTRI
Nip. 19670108 198609 2 001

Keterangan :

Kolom (4) Diisi dengan dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan strategis (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Surat Edaran/Tindakan Walikota/dll).

Kolom (5) Diisi dengan tujuan/masalah yang diselesaikan akibat pelaksanaan kebijakan strategis.



I. Capaian Realisasi Kegiatan Penanggulangan Covid-19 Yang Bersumber Dari BTT 2020 Pada Badan/Dinas/Kecamatan Lubuk Kilangan

Dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kecamatan Lubuk Kilangan didukung oleh anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar 2.562.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 646.092.000,- atau 25 %, dengan uraian sebagai berikut:

No	BTT	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi (%)
1	BTT Tahap 1	Rp 823.670.000,-	Rp 151.755.810,-	18,42 %
2	BTT Tahap 2	Rp 509.522.000,-	Rp 494.336.190,-	97,02 %
3	BTT Tahap 3	Rp 1.228.808.000,-	Rp 0	0 %
4	Dst.....	Rp.....	Rp.....
Total		Rp 2.562.000.000,-	Rp 646.092.000,-	25 %

II. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Pada Penyelenggaraan BTT

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
1	BTT Tahap 1	Juknis belum keluar sedangkan waktu pencairan juga sedikit untuk setoran pengembalian STS	Karena waktu yang sedikit maka realisasi sesuai situasi Covid pada saat bulan itu saja
2	BTT Tahap 2	Realisasi bisa 96 % karena waktu yang cukup dan RKB yg di mintakan hanya untuk satu Bulan	-
3	BTT Tahap 3	Waktu Pencairan yang terlambat sedangkan pengembalian STS harus di segerakan	Tidak di cairkan karena situasi ahir Tahun yang tidak memungkinkan
4	Dst	Juknis belum keluar sedangkan waktu pencairan juga sedikit untuk setoran pengembalian STS	Karena waktu yang sedikit maka realisasi sesuai situasi Covid pada saat bulan itu saja



**Daftar Nama Personil Penyusun LKPJ Walikota Padang
Kecamatan Lubuk Kilangan**

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Golongan	NO HP
1	Dessy, SE	19811218 201101 2 002	Penata Muda Tk 1 / (III/b)	081374119186

PADANG, 8 Januari 2020
Plt CAMAT LUBUK KILANGAN

Dra. RACHMADENY DEWI PUTRI
Nip. 19670108 198609 2 001

**REALISASI DANA BTT KECAMATAN SE-KOTA PADANG TAHUN 2020
(BERDASARKAN LAPORAN REALISASI DARI MASING-MASING KECAMATAN)**

NO	KECAMATAN	Pagu PerKelurahan	Jumlah Kelurahan	Pagu Awal/DAU	Realisasi Belanja Langsung	Anggaran BTT	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
1	Nanggalo	366,000,000	6	2,196,000,000		2,196,000,000	1,799,792,700	396,207,300	82%
2	Koto Tangah	366,000,000	13	4,758,000,000		4,758,000,000	4,280,298,900	477,701,100	90%
3	Padang Utara	366,000,000	7	2,562,000,000		2,562,000,000	1,333,554,340	1,228,445,660	52%
4	Pauh	366,000,000	9	3,294,000,000	297,509,256	2,996,490,744	1,094,021,485	1,902,469,259	37%
5	Kuranji	366,000,000	9	3,294,000,000		3,294,000,000	1,420,368,000	1,873,632,000	43%
6	Padang Barat	366,000,000	10	3,660,000,000	165,512,500	3,494,487,500	1,763,511,328	1,730,976,172	50%
7	Lubeg	366,000,000	15	5,490,000,000		5,490,000,000	3,865,914,000	1,624,086,000	70%
8	Luki	366,000,000	7	2,562,000,000		2,562,000,000	646,092,000	1,915,908,000	25%
9	Bungus	366,000,000	6	2,196,000,000		2,196,000,000	800,203,700	1,395,796,300	36%
10	Padang Selatan	366,000,000	12	4,392,000,000	34,948,800	4,357,051,200	1,999,492,837	2,357,558,363	46%
11	Padang Timur	366,000,000	10	3,660,000,000	61,592,000	3,598,408,000	1,720,354,400	1,878,053,600	48%
	Jumlah	4,026,000,000	104	38,064,000,000	559,562,556	37,504,437,444	20,723,603,690	16,780,833,754	53%

Padang, 8 Januari 2020
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



Dra. Rachmadeny Dewi Putri
NIP. 196701081986092001